

PENGARUH AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN
BPKAD KOTA PALOPO

Mini
A.Dahri Adi Patra LS,S.E.,M.Si.
Jumawan Jasman,S.E.,M.M.

Akuntansi, fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo, jalan jendral Sudirman
Km. 3 , Kota Palopo, Sulawesi Selatan
*Email:

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the accessibility of financial reports and regional financial accounting system on financial accountability at the BPKAD office Palopo City. This study uses 40 primary data sampels, with a total sampling method of collecting data using a questionnaire, with the help of the SPSS 23 application. Based on the results of this test, the accessibility of financial statements has a significant effect on financial accountability, while the regional financial accounting system has a significant effect on financial accountability.

Keywords: accessibility of financial reports, regional financial accounting system, financial accountability

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan data primer sebanyak 40 sampel, dengan metode pengambilan sampel *total sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisisioner, dengan bantuan aplikasi SPSS 23. Berdasarkan hasil pengujian ini, Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Kata Kunci : Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas Keuangan.

PENDAHULUAN

Di jaman reformasi yang berlangsung saat ini di Indonesia masyarakat menuntut agar

pemerintahan mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik. Otonomi daerah

menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan faktor penting terwujudnya publikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui media massa seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun, televisi, dan *website* (internet) dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas keuangan Yuliana (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah di pahami.

Telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengharuskan setiap kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk menyajikan laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah harus mengacu kepada standar akuntansi pemerintah. Tuntutan untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban tersebut sangat tergantung sistem akuntansi yang diterapkan karena produk akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dimaksud bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku (Utami, 2018).

Undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional, Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan dan Penetapan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Data dan Informasi, dan Kelembagaan.

Dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang kuat dan baik diharapkan mampu menciptakan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dari sebelumnya. Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban yang dilakukan di dalam suatu instansi dimana pihak yang berkepentingan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan dan dia kerjakan. Pertanggungjawaban yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya untuk melakukan pengelolaan suatu keuangan secara terbuka kepada masyarakat secara luas guna untuk menjalankan amanah rakyat terkait pengelolaan keuangan daerah (Fahmi, 2021).

Agar akuntabilitas sektor publik dapat dilaksanakan diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang adil, efektif, efisien. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah menghasilkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi (Lily, 2015).

Melihat kembali permasalahan dan kondisi pada pengelolaan keuangan pemerintah saat melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beberapa tahun terakhir ini, sangat disayangkan banyak instansi daerah di Indonesia yang menerima laporan keuangan yang tidak memenuhi syarat, namun masih

banyak kepala daerah beserta jajarannya yang dirundung korupsi. Komisi yang timbul karena aktivitas yang tidak semestinya. Melihat situasi tersebut, pemerintah daerah harus mendorong dan menekankan perbaikan dalam bentuk sistem yang kuat untuk memperoleh laporan keuangan yang baik, bertanggungjawab dan bebas dari kesalahan, kemudian pemerintah pusat akan merespon dan mengkonfirmasi, serta mengeluarkan peraturan pemerintah (Fahmi, 2021).

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh Saleha (2014) yang menunjukkan bahwa sistem keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amrul (2018), Ichals et al., (2014) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai judul **“Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kantor BPKAD Kota Palopo”**.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori tentang keagenan (*agency theory*) pertama kali dikemukakan oleh Berle dan

Means (1932), kemudian dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan kewajiban pihak yang terkait dalam suatu entitas yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Teori keagenan (*agency theory*) sebagai acuan dalam memaknai akuntabilitas publik sebagai kewajiban dari pemerintah sebagai pihak pemegang amanah (*agent*) dalam memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat sebagai pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto dkk, 2007 dalam Rosalin, 2011).

Yusrianti dkk (2013:5) mengemukakan hubungan antara riset teori agensi adalah pemerintah bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) harus menetapkan strategi khusus agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada publik sebagai prinsipal. Masalah keagenan dalam praktek pelaporan keuangan pada organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. *Agency theory* memfokuskan perhatian pada *agency problem* yang terjadi ketika terdapat hubungan keagenan antara *principal* dengan *agent*. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan dan masyarakat atau publik yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai tercapainya akuntabilitas. Hubungan keagenan (*agency relationship*) dapat digambarkan dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah (Rosalin, 2011). Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini adalah menjelaskan pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan para pengguna informasi

keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakilwakilnya.

Teori keagenan dalam penelitian ini juga dapat menjelaskan pertanggung jawaban pemerintah menyajikan informasi laporan keuangan yang mudah diakses bagi para pengguna laporan keuangan seperti akses melalui media dan website resmi pemerintah (situs internet). Selain itu, teori keagenan dalam penelitian ini menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan daerah harus diawasi dengan internal control system agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa penyajian laporan keuangan daerah yang tepat sesuai dengan aturan yang ada.

1.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Aksesibilitas laporan keuangan juga merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan, Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Wahyuni et al., 2014).

Menurut PP No. 24 Tahun 2005, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah terhadap kinerjanya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang telah selesai dilakukan penyusunan segera mungkin disampaikan kepada publik, penyampaian sebuah laporan keuangan sangat penting dilakukan guna untuk memberikan transparansi dari laporan keuangan tersebut, masyarakat berharap pemerintah daerah bisa menyediakan suatu akses yang mana nantinya laporan keuangan tersebut bisa didapatkan dengan mudah (Fahmi, 2021).

Aksesibilitas laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan kemampuan suatu daerah untuk menyediakan suatu kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan atau pihak *stakeholder* guna untuk mengetahui dan memperoleh sebuah informasi laporan keuangan yang bisa dijadikan untuk pengambilan keputusan. Ketersediaan kemudahan akses inilah yang nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat secara menyeluruh untuk mengetahui informasi-informasi apa saja yang ada di dalam laporan keuangan daerah tersebut, dimana masyarakat secara luas bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang mereka butuhkan misalnya untuk pengambilan keputusan. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep Pertanggungjawaban mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*Accountability* dan *Stewardship*). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan Hehanussa (2015).

Aksesibilitas laporan keuangan daerah juga ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas transparansi dan akuntabilitas akan

tergantung pada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dengan demikian, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas yang efektif, pemerintah dapat menggunakan berbagai media untuk mempublikasikan laporan keuangannya dan/atau menggunakan forum yang dapat memberikan perhatian langsung guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah Hehanussa, (2015).

Soleha (2014) menyatakan laporan keuangan memiliki empat kepentingan yaitu akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi. Sebagai akuntabilitas artinya suatu instansi pemerintah seharusnya mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan secara periodik.

Menurut Kurniawati (2016) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada beberapa indikator dalam proses aksesibilitas adalah sebagai berikut:

1. Seluruh *stakeholder* memiliki akses terhadap laporan keuangan
2. Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses
3. Ketersediaan informasi saat dibutuhkan.

Menurut Kurniawati (2016) adapun pengertian dari indikator aksesibilitas laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk mengetahui atau memperoleh informasi atas laporan keuangan berdasarkan prinsip murah dan biaya murah.
2. Kemampuan akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.
3. Kemampuan menyediakan informasi laporan keuangan tepat waktu dan pada saat dibutuhkan oleh para stakeholder

2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Daerah. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer Superdi (2017).

Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut pasal 232 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah Lily (2015).

Utami (2018) dalam menyusun sistem akuntansi sektor publik perlu mempertimbangkan beberapa faktor yaitu:

1. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan.
2. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi. Untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, sistem akuntansi harus disusun dengan

mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal.

3. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keekonomisan. Hal ini berarti biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal.

Sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai peran yang sangat penting terkait penyampaian sebuah informasi, sistem akuntansi ini digunakan sebagai fasilitas untuk menunjang kinerja dari pemerintah daerah. Sistem akuntansi ini diharapkan bisa memperbaiki sistem pencatatan dan sistem pelaporan menuju ke arah yang semakin baik (Fahmi, 2021). Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain yang digunakan untuk mendukung terciptanya fungsi akuntansi dari awal analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di dalam lingkup pemerintah daerah (Permendagri No. 64 Tahun 2013). Tujuan dari sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai alat yang nantinya bisa mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang ada pada SAP serta kebijakan akuntansi yang menjadikan serangkaian prosedur pencatatan yang menggunakan pencatatan double entry dalam laporan keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tingkat pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan memiliki tingkat hubungan yang sedang memberikan pengaruh signifikan (Soleha, 2014).

1.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media. Pertanggungjawaban pemerintah daerah yang terbuka dan akuntabilitas terhadap penyajian laporan keuangan, diharapkan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mendefinisikan Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic Wiyana dan Sutrisna,(2012). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pengelolaan keuangan yang baik membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara financial.

Oleh, sebab itu pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen layanan. Dengan pengertian yang lebih luas, akuntabilitas berarti pelayanan kepada publik dan pertanggungjawaban kepada publik. Dalam suatu struktur pemerintah, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan. Asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Ciri-ciri pemerintahan yang akuntabilitas:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.

2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan pemerintah.
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut yakni DPR dan masyarakat luas. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN), akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pihak yang berhak untuk meminta keterangan terhadap pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas (Putri, 2017).

Menurut (Wijaya et al., 2014) Terdapat tiga dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum) yaitu:

- a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalagunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- b. Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

- c. Akuntabilitas Program dan Kebijakan Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan petanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Dalam sektor publik, dikenal beberapa bentuk dari akuntabilitas, yaitu:

- 1) Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*), menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif, seperti seorang dirjen kepada menteri.
- 2) Akuntabilitas keluar (*outward accountability*), bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan *stakeholders* dalam masyarakat.
- 3) Akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*), menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebagai apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

HIPOTESIS

a. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*)

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka publik (badan pemeriksa, masyarakat maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset daerah dan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al., (2014)), menunjukkan bahwa Aksesibilitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Ichlas et al., (2014) menunjukkan bahwa Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.

H1: Diduga bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan.

b. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung-jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah. Akuntabilitas terbentuk dalam sebuah laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan

keuangan, dan laporan barang maka perlu untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, menunjang pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah maka harus perlu dikembangkan dan disusun sistem akuntansi keuangan daerah yang tepat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Soleha, 2014 menunjukkan bahwa sistem keuangan daerah memberikan pengaruh simultan yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Utami (2018), menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

H2 : Diduga bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang sesuai objek permasalahan yang diteliti dalam judul ini yakni Aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah pada kantor BPKAD Kota Palopo. Dimana penelitian menggunakan metode kuantitatif menggunakan metode survey. Dimana penelitian ini menggunakan desain korelasional, yaitu hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor BPKAD Kota Palopo Jln. Jendral Sudirman, Binturu, wara selatan, Kota Palopo. Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih 3 bulan setelah seminar.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi sendiri merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu Lubis (2010)

. Populasi pada penelitian ini yaitu pegawai yang berada di Kantor BPKAD Kota palopo

Sampel dalam penelitian ini yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Teknik pengambilan sampel pada penelitian yaitu menggunakan metode total sampling. Metode total sampling yaitu peneliti mengambil seluruh populasi sebagai sampel, sehingga sampel untuk penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor BPKAD Kota Palopo.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bersifat memahami dan menggambarkan fenomena atau gejala sosial yang sedang diteliti, sedangkan penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui kusioner yang disebarakan kepada karyawan pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara metode survei yang dimana metode pengumpulan data menggunakan kusioner. Metode survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis Sanusi anwar, (2014).

3.6 Instrumen Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) “Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti”. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kusioner (angket). Kusioner dengan Skala Likert digunakan untuk mengumpulkan data. Skala Likert adalah jenis data yang digunakan untuk mengukur reaksi seseorang terhadap objek social. Skala Likert ini meliputi:

Alternatif Jawaban dengan Skala Likert

Simbol Alternatif Jawaban Nilai

- | | |
|----------------------------|----|
| 1. SS (Sangat Setuju) | :5 |
| 2. S (Setuju) | :4 |
| 3. N (Normal) | :3 |
| 4. TS (Tidak Setuju) | :2 |
| 5. STS Sangat tidak Setuju | :1 |

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total dengan menggunakan *pearson correlation*. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikan dibawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Indikator Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X ₁)	X1.1	0,695	0,263	Valid
		X1.2	0,742	0,263	Valid
		X1.3	0,755	0,263	Valid
		X1.4	0,931	0,263	Valid
		X1.5	0,797	0,263	Valid
2	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₂)	X2.1	0,857	0,263	Valid
		X2.2	0,816	0,263	Valid
		X2.3	0,735	0,263	Valid
		X2.4	0,811	0,263	Valid
		X2.5	0,853	0,263	Valid
3	Akuntabilitas Keuangan (Y)	Y.1	0,801	0,263	Valid
		Y.2	0,960	0,263	Valid

		Y.3	0,8 59	0,2 63	Valid
		Y.4	0,8 99	0,2 63	Valid
		Y.5	0,9 32	0,2 63	Valid

Sumber: Data Diolah di SPSS tahun 2021

Dapat diketahui hasil uji validitas dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk semua variabel dinyatakan valid, karena nilai signifikan lebih kecil 0,05 (5%) dan karena korelasi antara masing-masing skor pernyataan lebih besar dari r tabel yakni 0.263.

4.3.2.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dikatakan *reliable* jika nilai *cronbach Alpha* berada diatas 0,6. Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini, disajikan dalam tabel. 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,839	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,873	Reliabel
Akuntabilitas Keuangan	0,935	Reliabel

Sumber: Data Diolah di SPSS tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini telah *reliable* karena secara keseluruhan variabel memiliki nilai *cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrument kuesioner dalam penelitian ini

3.3 Uji Analisis Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan pada penelitian yang menggunakan lebih dari satu variabel. Pengujian linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji regresi linear berganda dalam penelitian ini, disajikan dalam tabel 4.8 berikut i

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,309	3,293		-,397	,693
Aksesibilitas laporan keuangan (X1)	,554	,163	,451	3,409	,002
Sistem akuntansi keuangan daerah (X2)	,501	,168	,393	2,971	,005

a. Dependent Variable: Total_Y

Rumus yang didapatkan dari hasil pengujian tabel 4.8 yaitu: $Y = -1,309 + 0,554 X_1 + 0,501 X_2 + e$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.8 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar -1,309 menunjukkan bahwa apabila variabel independen yaitu Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) sama dengan nol maka diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai akuntabilitas keuangan (Y) sebesar -1,309.
- b. Nilai koefisien Aksesibilitas Laporan Keuangan sebesar 0,554 hal ini berarti bila aksesibilitas laporan keuangan bertambah satu satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0,554 atau 55,4%.
- c. Nilai koefisien Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,501 hal ini berarti bila Sistem Akuntansi Keuangan Daerah bertambah satu satuan maka akan meningkatkan Akuntabilitas keuangan sebesar 0,501 atau 50%.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,745 ^a	,554	,530	1,775

a. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1

Sumber : Data diolah di SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh *Adjusted R Square* sebesar 0,530 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen yang terdiri atas aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap variabel dependen adalah sebesar 53% sedangkan sisanya 47% dipengaruhi oleh

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengartikan bahwa masih besar faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Uji t

Tabel 4.10
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,309	3,293		-,397	,693
	Aksesibilitas Laporan Keuangan X1	,554	,163	,451	3,409	,002
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X2	,501	,168	,393	2,971	,005

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Data Diolah di SPSS, 2021

Tabel 4.10 menunjukkan hasil pengujian antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan

berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil pengujian mempunyai probabilitas sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 3,409 > t_{tabel} 1,685$. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil pengujian mempunyai probabilitas sebesar $0,005 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,971 > t_{tabel} 1,685$. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pada BPKAD Kota Palopo

Dalam penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hal ini sejalan dengan Teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini juga dapat menjelaskan pertanggung jawaban pemerintah menyajikan informasi laporan keuangan yang mudah diakses bagi para pengguna laporan keuangan seperti akses melalui media dan website resmi pemerintah (situs internet). Selain itu, teori keagenan dalam penelitian ini menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan daerah harus diawasi dengan internal control system agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupapenyajian laporan keuangan daerah yang tepat sesuai dengan aturan yang ada dan untuk kepentingan publik. Dalam penelitian menunjukkan bahwa hasil dari nilai $t_{hitung} = 3,409 > t_{tabel} 1,685$ dan signifikansi 0,002, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Artinya jika aksesibilitas laporan keuangan ditingkatkan,

maka akuntabilitas keuangan juga akan meningkat. Sebaliknya jika aksesibilitas laporan keuangan menurun, maka akuntabilitas keuangan juga akan menurun. Hal ini menandakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan yang baik dapat memberikan pengaruh yang baik pula pada akuntabilitas keuangan atau sebaliknya.

Aksesibilitas laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan karena kemudahan akses laporan keuangan daerah sebagai salah satu alat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah jika didukung dengan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan dan masyarakat seperti melalui *website* resmi pemerintah dan penyebaran informasi harus terus diperbarui sehingga akuntabilitas publik dapat berjalan dengan baik.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Amrul, (2018) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. dan penelitian Wahyuni dan Sulindawati (2014) menyatakan bahwa menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan daerah terhadap akuntabilitas Keuangan pada BPKAD Kota Palopo

Dalam penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan pada. Hal ini sejalan dengan Teori keagenan (*agency theory*) sebagai acuan dalam memaknai akuntabilitas publik sebagai kewajiban dari pemerintah sebagai pihak pemegang amanah (*agent*) dalam memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat. Dalam penelitian menunjukkan bahwa hasil dari nilai $t_{hitung} = 2,971 > t_{tabel} 1,685$ dan signifikansi 0,005, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Artinya jika sistem akuntansi keuangan daerah ditingkatkan, maka akuntabilitas keuangan juga akan meningkat. Sebaliknya jika sistem akuntansi keuangan daerah menurun, maka akuntabilitas keuangan juga akan menurun. Hal ini menandakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dapat memberikan pengaruh yang baik pula pada akuntabilitas keuangan atau sebaliknya.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Amrul, (2018) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. dan penelitian Wahyuni dan Sulindawati (2014) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada BPKAD Kota Palopo, jika aksesibilitas laporan keuangan ditingkatkan, maka akuntabilitas keuangan juga akan meningkat. Sebaliknya jika aksesibilitas laporan keuangan menurun, maka akuntabilitas keuangan juga akan menurun.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada BPKAD Kota Palopo, jika sistem akuntansi keuangan daerah ditingkatkan, maka akuntabilitas keuangan juga akan meningkat. Sebaliknya jika sistem akuntansi keuangan daerah menurun, maka akuntabilitas keuangan juga akan menurun.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya yang memiliki topic dan tema yang sama.
2. Selain menggunakan kuesioner secara tertulis bias ditambahkan dengan wawancara atau interview. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian, agar dapat diketahui adanya variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Amrul, R. B. P. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Fahmi, M. N. A. B. M. N. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 6(1), 16–26.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Ichlas, M., Dr. Hasan Basri. M.Com, A., & Dr.

- Muhammad Arfan. SE, M.Si, Ak, C. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(4), 76–84.
- Kurniawati, M. M. H. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi*, 1–116.
- Lily. (2015). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2(2), 1–15.
- Lubis, A. I. (2010). *Akuntansi Keperilakuan, Edisi 2*. Salemba Empat.
- Putri, F. E. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *jom fekom*, 32.
- Sanusi anwar. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Soleha, N. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada Skpd Kabupaten/Kota Propinsi Banten. *Etikonomi*, 13(1), 21–34.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sijunjung). *JOMFekom*, 4(1), 205–2019.
- Utami, R. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Ketepatan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Pontianak*. 1–23.
- Wahyuni, P. S., Sulindawati, N. L. G., & Herawati, N. T. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Badung). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Wijaya, M., Susanti, N., & Afriani, S. (2014). Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 141–150.
- Wiyana, A., & Sutrisna, A. (2012). Determinan aksibilitas dan penyajian LKD terhadap akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah. *Seminar Nasional dan The 3rd call for Syariah Paper*, 1, 313–322.
- Yuliana, N. L. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan

Pengendalian Internal Terhadap
Transparansi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan
Ekonomi (JBE)*, 24(1), 1–14.